

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUBSIDI DALAM APBN : MASALAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

SUBSIDI SOLAR



	Kelompok Kesejahteraan				
	1	2	3	4	5
Perkotaan	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,11%
Perdesaan	0,01%	0,04%	0,07%	0,09%	0,31%
Total	0,01%	0,04%	0,06%	0,07%	0,17%

Kelompok terkaya (kuintil 5) merupakan kelompok pengguna solar terbesar dibandingkan dengan kelompok termiskin (kuintil 1).

Subsidi yang diberikan pemerintah malah tidak dinikmati oleh nelayan melainkan oleh industri perikanan besar. Subsidi tersebut tak dinikmati secara menyeluruh oleh para nelayan kecil (Juli, 2017).



Kebijakan subsidi listrik hingga tahun 2016 cenderung tidak berpihak pada masyarakat miskin. Rata-rata subsidi yang diterima kelompok paling sejahtera (desil 10) mencapai lebih dari 2,5 kali yang diterima oleh kelompok paling miskin (desil 1).

Besarnya subsidi dominan diberikan kepada pelanggan rumah tangga tipe R-1/450 VA dan R-1/900 VA yakni sebesar sekitar 87 persen dari total subsidi listrik, namun tidak semua pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA tergolong miskin dan rentan. Hal inilah yang menunjukkan inefektifitas pengelolaan subsidi listrik selama ini.

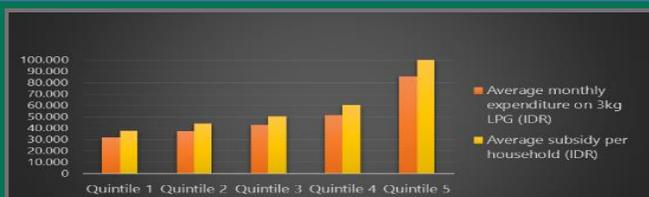
SUBSIDI LISTRIK



SUBSIDI GAS



Data Susenas 2015 menunjukkan 60 juta rumah tangga menggunakan LPG 3kg, padahal Basis Data Terpadu menunjukkan hanya ada 26 juta rumah tangga miskin. Artinya, proporsi subsidi LPG lebih besar dinikmati oleh rumah tangga non-miskin.



Rumah tangga terkaya (kuintil 5) mengonsumsi LPG 3 kg dalam jumlah paling banyak, lebih dari 2 kali lipat konsumsi LPG 3 kg pada rumah tangga miskin/ rentan miskin (kuintil 1/kuintil2).

Deloitte dan Bank Dunia (2014) juga menemukan banyak beras Bulog berkualitas buruk, program Raskin tidak tepat sasaran dan lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Hasil penelitian Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) di tiga kota, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukan bahwa hanya sekitar 50 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan penyaluran subsidi pangan non tunai, masih ditemukan data KPM yang belum tepat sasaran serta agen (e-warong) yang tidak setiap hari melayani KPM.

SUBSIDI PANGAN



Bank Dunia (2009) juga menemukan hal yang relatif sama dimana pada tahun 2007, untuk subsidi pupuk urea, 20% petani yang termasuk kategori kaya menikmati 45% dari total subsidi. Untuk TSP, mereka menerima 38% dari total subsidi.

SUBSIDI PUPUK



Subsidi pupuk juga relatif tidak dinikmati oleh petani kecil atau petani gurem. Petani kaya yang berjumlah 44 persen rumah tangga tani dengan luas lahan > 0,5 ha menerima 83,7 persen subsidi pupuk dan benih (Santosa, 2017).

Permasalahan lainnya adalah ketidaksesuaian antara Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan pasokan pupuk yang disediakan oleh distributor. (KPK, 2017).

Perusahaan pembibitan benih hortikultura dikuasai oleh asing, yakni sebesar 78 persen (Pambudi, 2012).

Santosa (2017) yang mengatakan bahwa petani kaya yang berjumlah 44 persen rumah tangga tani dengan luas lahan > 0,5 ha menerima 83,7 persen subsidi pupuk dan benih.

SUBSIDI BENIH



REKOMENDASI KEBIJAKAN

JENIS SUBSIDI	BENTUK/MEKANISME DISTRIBUSI SAAT INI	REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN	
		BENTUK/MEKANISME	PRASYARAT UTAMA EFEKTIF
Solar	Subsidi Harga Tetap/Distribusi Terbuka	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Tertutup (targeted)	Validitas dan Kemutakhiran Data, Berbasis Tanda Identitas Penerima Manfaat, Pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana, Pengawasan Yang Kuat dan Kuantitas SP Khusus Nelayan
LPG 3 Kg	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Terbuka	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Tertutup (targeted)	Validitas dan Kemutakhiran Data, Berbasis Tanda Identitas Penerima Manfaat, Pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana, Pengawasan Yang Kuat, dan memperhatikan disparitas harga LPG 3 Kg dengan 12 Kg.
Listrik	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Tertutup	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Tertutup (targeted)	Validitas dan Kemutakhiran Data, dan Pengawasan Yang Kuat.
Pupuk	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Terbuka	Subsidi Orang (RTS)/targeted	Validitas dan Kemutakhiran Data, Berbasis Tanda Identitas Penerima Manfaat, Pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana dan Pengawasan Yang Kuat.
Benih	Subsidi Selisih Harga/Distribusi Terbuka	Dihapus/Dialihkan	Pengalihannya dalam bentuk subsidi orang yang mampu mengurangi komponen biaya produksi petani kecil/gurem.
Pangan	Subsidi Orang (RTS)/targeted	Subsidi Orang (RTS)/targeted	Validitas dan Kemutakhiran Data, Berbasis Tanda Identitas Penerima Manfaat, Pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana, Pengawasan Yang Kuat dan Biaya distribusi yang tidak dibebankan kepada PEMDA dan RTS

1

Pemerintah harus meredesain kembali beberapa subsidi baik dari segi bentuk maupun pola distribusinya. Bentuk subsidi harga/barang dengan pola distribusi terbuka merupakan salah satu penyebab terbesar ketidakefektifan pengelolaan subsidi hingga saat ini. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menerapkan subsidi selisih harga dengan distribusi tertutup untuk solar, LPG dan Listrik

2

Penguatan basis data penerima manfaat yang lebih valid dan termutakhir, menciptakan mekanisme penyaluran subsidi yang sederhana dan pemanfaatan teknologi informasi. Pilihan alternatif kebijakan yang sudah jelaskan diatas sangat mensyaratkan ketiga hal tersebut. Untuk basis data yang valid dan mutakhir, ini sangat menentukan ketepatan penyaluran subsidi kepada sasaran penerima manfaat.

3

Pengalihan subsidi benih. Kebijakan pemerintah yang menghapuskan alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN 2018 dirasa sudah tepat. Hal ini didasari pada tidak efektifnya penyaluran subsidi benih. Selain tidak efektif, keenganan petani menggunakan benih pupuk yang disalurkan oleh pemerintah dan dampak negatif penerapan subsidi terhadap produktifitas pembibitan.

4

Penerapan "Subsidi Output Pertanian" untuk komoditas pertanian strategis seperti beras, cabai merah dan bawang dengan mekanisme *after sold cash transfer*. Pemberian subsidi output tersebut dapat lebih "men-drive" produktifitas pertanian dan dampak langsungnya dapat dirasakan oleh petani. Dan untuk jangka panjang akan berimbas pada lebih terjangkau harga bagi konsumen (baik masyarakat maupun agroindustri).